

PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DAN PROFESIONALISME PEGAWAI TERHADAP KUALITAS LAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK: SURVEY DISPENDA KOTA CIMAH

Heni Nurani Hartikayanti

Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi
henuyanti@yahoo.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji : 1) Hubungan antara Kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan profesionalisme pegawai dan 2) Pengaruh kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan profesionalisme pegawai terhadap kualitas layanan pemungutan pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive verifivative dan explanatory survey. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Adapun jumlah responden yang mengembalikan kuesioner sebanyak 29 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil penelitian ini mengungkapkan : 1) Terdapat hubungan yang cukup erat dengan arah positif antara kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan profesionalisme pegawai dan 2) Pengaruh kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan profesionalisme pegawai berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas layanan pemungutan pajak

Kata kunci: Kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, profesionalisme pegawai, kualitas layanan pemungutan pajak.

EFFECT OF QUALITY OF LOCAL FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (SIPKD) AND PROFESSIONALISM EMPLOYEES VOTING TO QUALITY SERVICE TAX: Survey on Dispenda Cimahi

ABSTRACT. *This study aimed to examine: 1) The relationship between quality of local financial management information system and professional employees and 2) the effect of the quality of local financial management information system and professional services personnel to the quality of their tax collection. This type of research used in this study is descriptive verivicatif and explanatory survey. The sampling technique used was purposive sampling. The number of respondents who returned a questionnaire by 29 respondents. Data was collected using questionnaires and interviews. Analysis of the data used is regression analysis. The results of this study revealed: 1) There is a fairly close relationship with the positive direction between the quality of local financial management information system and employee professionalism and 2) the effect of the quality of local*

Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Profesionalisme Pegawai Terhadap Kualitas Layanan Pemungutan Pajak: Survey DISPENDA Kota Cimahi (Heni Nurani Hartikayanti)

financial management information system and professional employees are significant effect on the quality of service tax collection.

Keywords : Quality of local financial management information systems, employee professionalism, quality of service tax collection.

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah yang telah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 memberikan dampak pada sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Kondisi ini memerlukan perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar dalam hal pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah dengan tujuan utama untuk memberikan kemakmuran bagi daerah itu sendiri.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan didaerahnya. Untuk pengelolaan keuangan yang berasal dari pusat dan yang berasal dari daerah sendiri maka diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien. Untuk mendukung hal tersebut maka dibangun dan diterapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem ini dibangun dengan harapan dapat meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektifitas, transparan, akuntabel dan auditabel (Peraturan Departemen Dalam Negeri No 13 Tahun 2006).

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Dampak atas diberlakukannya undang-undang otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Menurut Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah pasal 2 menyatakan bahwa Ruang lingkup serta melakukan pinjaman; kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;. penerimaan daerah;d. pengeluaran daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Untuk memenuhi azas pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat maka diperlukan alat pengolahan informasi yang cukup akurat untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan sesuai